



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
XII



**DINAMIKA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DALAM
KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

PPKn KELAS XII

**EVY PAJRIANI
SMA KESATUAN BOGOR**

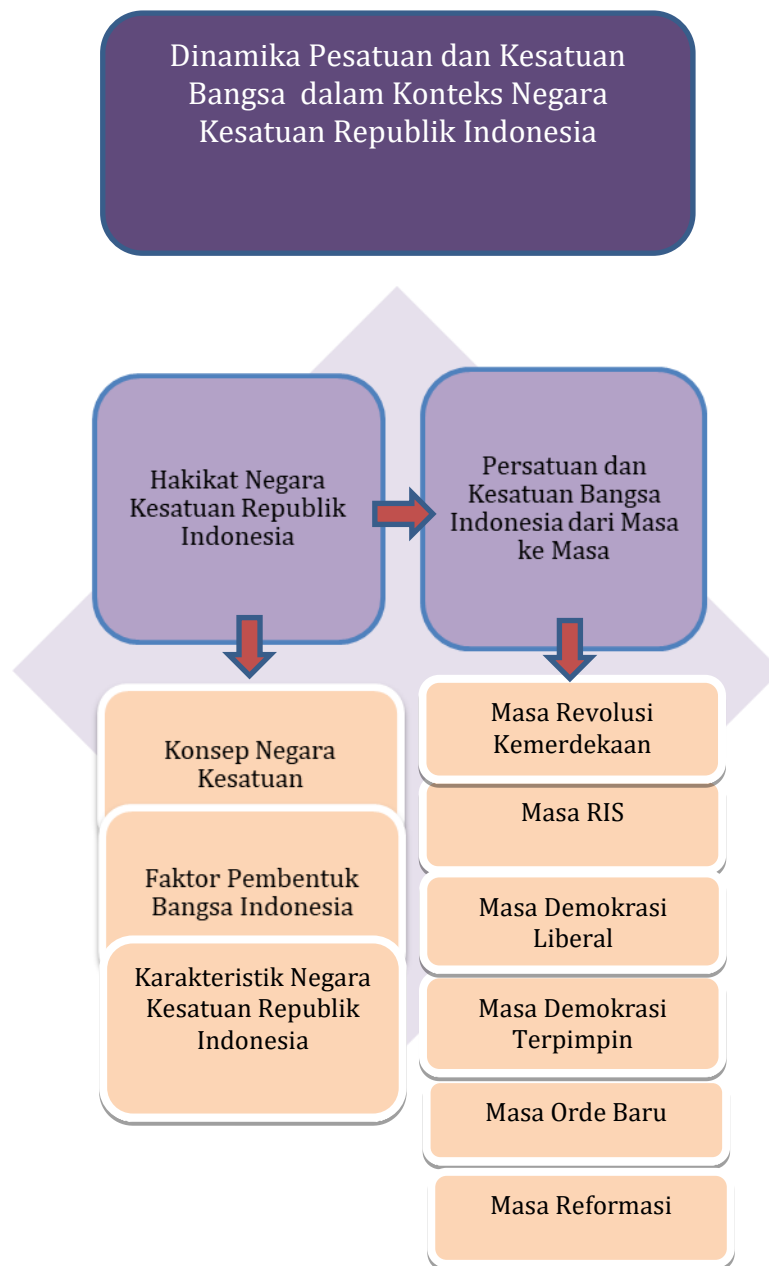
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	4
PETA KONSEP	5
PENDAHULUAN	6
A. Identitas Modul	6
B. Kompetensi Dasar	6
C. Deskripsi Singkat Materi	6
D. Petunjuk Penggunaan Modul	6
E. Materi Pembelajaran	6
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	7
Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	7
A. Tujuan Pembelajaran	7
B. Uraian Materi	7
C. Rangkuman	11
D. Penugasan Mandiri	12
E. Latihan Soal	12
F. Penilaian Diri	15
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	16
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa.....	16
A. Tujuan Pembelajaran	16
B. Uraian Materi	16
C. Rangkuman	19
D. Latihan Soal	20
E. Penilaian Diri	22
EVALUASI	23
DAFTAR PUSTAKA.....	28

GLOSARIUM

Demokrasi	sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara.
Kesatuan	hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh.
Korupsi	tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
Kolusi	kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji; persekongkolan
Nepotisme	kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah.
Nusantara	sebutan (nama) bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia
Persatuan	berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran : PPKn
Kelas : XII
Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit/2 kali pertemuan
Judul Modul : Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. Kompetensi Dasar

KD. 3.4 : Mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
KD. 4.4 : Merancang dan mengkampanyekan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini menuntun kalian untuk mempermudah dalam memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada modul ini akan membahas lebih dalam tentang bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar kalian dapat merancang dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka akan dipelajari terlebih dahulu mengenai konsep negara kesatuan, faktor pembentuk Bangsa Indonesia, karakteristik negara kesatuan republik Indonesia dan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa-kemasa mulai dari masa revolusi kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa orde baru dan masa reformasi.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk, yaitu sebagai berikut:

1. Bacalah modul ini secara keseluruhan, pada modul ini terdapat 2 kegiatan pembelajaran.
2. Upayakan kalian benar-benar memahaminya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri.
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh. Jika kalian serius dan jujur, maka kalian akan dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar.
4. Setelah mempelajari modul ini kalian akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia.
5. Selanjutnya diharapkan kalian dapat menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, penugasan mandiri, latihan soal, dan evaluasi. Berikut materi-materi pada setiap kegiatan pembelajaran:

Pertama : Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kedua : Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat memahami konsep negara kesatuan, faktor yang pembentuk Bangsa Indonesia serta mengidentifikasi karakteristik negara kesatuan republik Indonesia sehingga mampu mengkampanyekan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Uraian Materi

Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. John Locke dan Rousseau, negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Para ahli lain juga mengemukakan tentang negara yaitu.

Pengertian negara

- 1) Max Weber, negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu.
- 2) Mac Iver, sebuah negara harus memiliki tiga unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan.
- 3) Prof. Mr. Soenarko, Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan.
- 4) Prof. Miriam Budiardjo memberikan pengertian Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.



Gambar : 3.4.1 Gambar Pulau Indonesia
Sumber : idntimes.com

Unsur-unsur Negara

Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Warga negara adalah pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara yang paling

utama. Wilayah terdiri dari darat, udara dan juga laut. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Disamping ketiga unsur pokok (konstitutif) tersebut masih ada unsur tambahan (disebut unsur deklaratif) yaitu berupa pengakuan dari negara lain. Unsur negara tersebut diatas merupakan unsur negara dari segi hukum tata negara atau organisasi negara.

Fungsi Negara

- 1) Fungsi Pertahanan dan Keamanan
Negara wajib melindungi unsur negara (rakyat, wilayah, dan pemerintahan) dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal atau eksternal. Contoh: TNI menjaga perbatasan negara.
- 2) Fungsi Keadilan
Negara wajib berlaku adil dimuka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Contoh: Setiap orang yang melakukan tinfakan kriminal dihukum tanpa melihat kedudukan dan jabatan.
- 3) Fungsi Pengaturan dan Keadilan
Negara membuat peraturan-perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara.
- 4) Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran
Negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera.

Tujuan Negara

Miriam Budiharjo (2010) menyatakan bahwa Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Sedangkan tujuan Negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat; Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia.



Gambar : 3.4.2 Indahnya Keberagaman RAS dibawah NKRI
Sumber : idntimes.com

Dalam perjalanannya ada beberapa macam bentuk Negara yang digunakan oleh setiap Negara untuk dapat menjalankan Negeranya dengan baik sesuai dengan bentuk

negaranya. Tidak semua negara memiliki bentuk negara yang sama. Menurut teori modern, bentuk negara saat ini dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan (unitaris) dan negara serikat (federasi).

1) Negara Kesatuan (Unitaris)

Negara yang menganut bentuk Negara kesatuan salah satunya adalah Negara kita tercinta Indonesia, maka dari itu Indonesia juga sering disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara kesatuan adalah Negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintah pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah pusat juga diberi hak untuk dapat melimpahkan kekuasaannya kepada daerah-daerah yang tingkatannya lebih kecil didalamnya seperti provinsi dan kabupaten. Pemerintah bisa memberikan hak otonomi daerah kepada daerah dibawahnya untuk dapat menjalankan aturannya sendiri namun tentunya tetap berdasarkan aturan dan keputusan dari pusat.

Ciri-Ciri Negara Kesatuan

- a. Pada Negara kesatuan peraturan dasarnya didasarkan pada satu Undang-Undang Negara. Selain itu Negara kesatuan juga memiliki hanya satu kepala Negara, dewan perwakilan rakyat dan juga dewan Negara. Pada Negara kesatuan maka semuanya terpusat dan berdasarkan dari satu undang-undang tersebut, pemerintahannya pun terorganisir pada pusat. Hal ini memiliki manfaat yang baik dimana peraturan dan roda pemerintahan pun selalu seragam namun ada kalanya mengundang kesulitan ketika ada hal-hal yang harus diselesaikan di daerah namun harus menunggu keputusan dari pusat terlebih dulu.
- b. Semua hal yang berkaitan dengan kedaulatan Negara baik itu kedaulatan untuk urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri semuanya diserahkan kepada pusat untuk disetujui dan ditandatangani.
- c. Berbagai macam masalah seperti budaya, ekonomi, politik, keamanan, sosial dan pertahanan hanya memiliki satu buah kebijakan saja.

2) Negara Serikat

Bentuk negara federasi ini sangat cocok digunakan oleh negara yang memiliki kawasan yang sangat luas sehingga untuk dapat melaksanakan semua pemerintahannya secara menyeluruh dengan baik maka dibutuhkan adanya pembagian pusat dari pemerintah pusat kepada unsur-unsur daerah dibawahnya seperti negara bagian, wilayah, republik, provinsi dan lainnya. Kedaulatan negara tersebut tetap dimiliki oleh pemerintah federal yang berada di pusat namun negara-negara bagian lain di dalamnya juga memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur rakyatnya sendiri. Hal ini tentunya merupakan kekuasaan yang lebih besar daripada daerah-daerah yang ada di negara kesatuan. Akibatnya negara federasi lebih mudah dalam mengatur pemerintahannya karena kekuasaan dan kewajiban langsung dibagikan kepada negara bagian di dalamnya. Negara federasi ini dikenal dengan nama bentuk negara serikat. Salah satu contoh bentuk negara federasi adalah Amerika Serikat.

Ciri-Ciri Negara Federasi

- a. Kepala negara yang berada di pusat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki tanggungjawab yang besar kepada rakyat.
- b. Setiap negara bagian di dalamnya memiliki kekuasaan asli terhadap daerahnya sendiri namun tidak memiliki kedaulatan sebab kedaulatan negara tetap dipegang oleh kepala negara.
- c. Setiap negara bagian itu berhak mengatur undang-undangnya namun tetap harus selaras dengan undang-undang yang ada pada pemerintah pusat.
- d. Pemerintah pusat juga memiliki kedaulatan bagi negara bagian terutama untuk urusan yang berkaitan dengan bagian luar, sedangkan pada urusan dalam negara bagian pemerintah pusat memiliki sebagian kedaulatan.

Di lihat dari sejarahnya faktor pembentuk Bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda 28 oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ikrar Sumpah Pemuda berhasil diwujudkan para pemuda dari berbagai suku bangsa dan budaya di wilayah nusantara berikrar menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Kemudian peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang merupakan awal berdirinya bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) harus dapat menyatukan berbagai kelompok dan golongan yang beragam karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsadan ras yang tersebar di seluruh nusantara. Adapun faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing selama kurang lebih 350 tahun.
- 2) Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
- 3) Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke.
- 4) Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa

Kesatuan bangsa Indonesia bersifat *historis* karena bangsa Indonesia bersatu bukan hanya karena kesatuan bahasa ibu, suku, budaya, atau agama, tetapi sejarah yang dialami bersama dalam penderitaan, penindasan, perjuangan kemerdekaan, dan tekad untuk kehidupan bersama. Setiap negara kesatuan memiliki karakter yang berbeda, pun demikian dengan Indonesia. Setidaknya, ada beberapa ciri yang dimiliki Indonesia sebagai negara kesatuan, yang membuatnya berbeda dari negara lainnya. Adapun ciri khas tersebut sebagai berikut:

- 1) Indonesia sudah bertekad untuk menjadi negara kesatuan sejak dimulainya zaman kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945
- 2) Pembentukan negara kesatuan sesuai dengan tekad yang tertuang pada alinea kedua Pembukaan UUD RI Tahun 1945, yang berbunyi “dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.”
- 3) Prinsip kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperkuat lagi pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu “... dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.
- 4) Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 mengandung dasar bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik. Hal ini sesuai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
- 5) Pada perubahan UUD 1945, adanya ketetapan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengatur untuk tidak mengubah apapun dalam Pembukaan UUD 1945 dan menetapkan NKRI sebagai bentuk mutlak bagi Indonesia.
- 6) Dalam segi kewilayahan, karakteristik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 25A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang”. Istilah Nusantara digunakan untuk menunjukkan kesatuan wilayah perairan dan barisan pulau-pulau Indonesia. Walaupun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, namun semuanya bersatu dalam satu kesatuan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Tiga unsur pokok berdirinya sebuah negara (konstitutif) adalah penduduk, wilayah dan pemerintah berdaulat serta 1 unsur tambahan (disebut unsur deklaratif) yaitu berupa Pengakuan dari negara lain.
3. Negara mempunyai Fungsi Pertahanan dan Keamanan, Fungsi Keadilan, Fungsi Pengaturan dan Keadilan serta Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran
4. Tujuan negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat; Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
5. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintah pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
6. Negara serikat adalah bentuk negara yang Kedaulatan Negara tersebut tetap dimiliki oleh pemerintah federal yang berada di pusat namun Negara-negara bagian lain di dalamnya juga memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur rakyatnya sendiri.
7. Di lihat dari sejarahnya faktor pembentuk Bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda 28 oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Adapun faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. Adanya persamaan nasib, keinginan bersama untuk merdeka, kesatuan tempat tinggal, dan cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.

D. Penugasan Mandiri

Dari penjelasan diatas terlihat tidaklah mudah negara ini memperoleh kemerdekaan banyak sudah waktu, korban, kekayaan, yang kita berikan secara percuma. Sekarang kita semua punya tugas yang sangat berat, yaitu bagaimana mempertahankan kemerdekaan tersebut dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Sebagai pelajar kamu pasti punya peranan penting didalamnya. Buatlah rancangan dan mengkampanyekan persatuan dan kesatuan bangsa tersebut. Kampanye umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara, dan simbol-simbol. Silahkan kamu pilih salah satu dari bentuk dan jenis kampanye tersebut.

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Pendapat tersebut dikemukakan oleh
 - A. Max Weber
 - B. Mac Iver
 - C. Prof. Mr. Soenarko
 - D. Prof. Miriam Budiardjo
 - E. Harold J. Laski
2. Berikut ini yang merupakan tujuan Negara Indonesia adalah
 - A. menjadi negara adikuasa
 - B. membentuk negara maju
 - C. memajukan kesejahteraan umum
 - D. negara yang bebas dari hutang
 - E. negara anti penjajahan
3. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri bentuk negara kesatuan adalah
 - A. Kepala Negara yang berada di pusat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki tanggungjawab yang besar kepada rakyat.
 - B. Setiap Negara bagian di dalamnya memiliki kekuasaan asli terhadap daerahnya sendiri namun tidak memiliki kedaulatan sebab kedaulatan Negara tetap dipegang oleh kepala Negara.
 - C. Setiap Negara bagian itu berhak mengatur undang-undangnya namun tetap harus selaras dengan undang-undang yang ada pada pemerintah pusat.
 - D. Pemerintah pusat juga memiliki kedaulatan bagi Negara bagian terutama untuk urusan yang berkaitan dengan bagian luar, sedangkan pada urusan dalam Negara bagian pemerintah pusat memiliki sebagian kedaulatan.
 - E. Berbagai macam masalah seperti budaya, ekonomi, politik, keamanan, sosial dan pertahanan hanya memiliki satu buah kebijakan saja.
4. Peristiwa yang menjadi faktor pembentuk bangsa Indonesia adalah ...
 - A. Peristiwa rengasdengklok
 - B. Peristiwa Kongres Pemuda kedua tahun 1928.
 - C. Pertempuran Agresi militer Belanda kedua.
 - D. Konferensi Meja Bundar tahun 1949
 - E. Dekrit Presiden tahun 1959

5. Cita-cita atau tujuan Negara Indonesia terdapat dalam
- A. Pancasila
 - B. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
 - C. UUD NRI Tahun 1945
 - D. Diri setiap warga negara
 - E. Konstitusi

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

1. D 2. C 3. E 4. B 5. B

Pembahasan soal :

1. Prof. Miriam Budiardjo memberikan pengertian Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.
2. Sedangkan tujuan Negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat; Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
3. Ciri-Ciri Negara Kesatuan
 - 1) Pada Negara kesatuan peraturan dasarnya didasarkan pada satu Undang-Undang Negara. Selain itu Negara kesatuan juga memiliki hanya satu kepala Negara, dewan perwakilan rakyat dan juga dewan Negara. Pada Negara kesatuan maka semuanya terpusat dan berdasarkan dari satu undang-undang tersebut, pemerintahannya pun terorganisir pada pusat. Hal ini memiliki manfaat yang baik dimana peraturan dan roda pemerintahan pun selalu seragam namun ada kalanya mengundang kesulitan ketika ada hal-hal yang harus diselesaikan di daerah namun harus menunggu keputusan dari pusat terlebih dulu.
 - 2) Semua hal yang berkaitan dengan kedaulatan Negara baik itu kedaulatan untuk urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri semuanya diserahkan kepada pusat untuk disetujui dan ditandatangani.
 - 3) Berbagai macam masalah seperti budaya, ekonomi, politik, keamanan, sosial dan pertahanan hanya memiliki satu buah kebijakan saja.
4. Dilihat dari sejarahnya faktor pembentuk Bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda 28 oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
5. Tujuan Negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat; Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya memahami tentang pengertian negara, unsur-unsur, tujuan dan fungsinya		
2.	Saya memahami tentang negara kesatuan dari pengertian, contoh negara dan ciri-cirinya		
3.	Saya memahami tentang negara serikat dari pengertian, contoh negara dan ciri-cirinya		
4.	Saya dapat mengidentifikasi faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia		
5.	Saya mengetahui karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia		
6.	Saya siap melaksanakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan sehari-hari		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian mampu menjelaskan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, masa RIS (Republik Indonesia Serikat), masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa orde baru dan masa reformasi.

B. Uraian Materi

Persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia akan kita bahas dari masa ke masa dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Revolusi Kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)



Gambar : 3.4.3 Menjelang Kemerdekaan Indonesia
Sumber : intisari.gris.id

Pada periode ini, bentuk Negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya.

Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945. Dilaksanakanlah sidang PPKI. Sidang tersebut menetapkan UUD NRI Tahun 1945 dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah itu PPKI menetapkan pembagian kekuasaan dengan mem bagi Indonesia menjadi 8 provinsi. Pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah KNIP dan PPKI dibubarkan. Salah satu ketetapan mengenai dibentuknya KNIP adalah pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia.

Pada tanggal 2 September 1945 disusunlah kabinet pertama RI yang mengangkat 17 menteri juga mengangkat sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah itu keluarlah maklumat pemerintahan yaitu Maklumat 5 Oktober 1945, Maklumat 3 November

1945 dan Maklumat 14 November 1945. Setelah dikeluarkam Maklumat 14 November 1945 kedudukan presiden berubah, hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Karena fungsi kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Terlihatlah sistem pemerintahan Indonesia yang beralih dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Dengan peralihan ke sistem pemerintahan parlementer, membuat terbentuknya banyak kabinet seperti kabinet presidensial, kabinet Sjahrir I, kabinet Sjahrir II, kabinet Sjarir III, kabinet Amir Sjarifuddin I, kabinet Amir Sjarifuddin II, Hatta I dan Hatta II.

Pada masa ini terjadi pula pemberontakan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun 1948 dan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)



Gambar : 3.4.4 Penandatanganan Piagam Persatuan RIS
Sumber : wawasan sejarah.com

Negara Indonesia berubah bentuk negara dari negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Serikat. Hal itu terjadi sejak 27 Desember 1949 pada perjanjian Konferensi Meja Bundar. Berdasarkan konstitusi RIS, presiden adalah kepala negara tidak didampingi oleh seorang wakil presiden. Jika berhalangan hadir maka yang menggantikan posisi presiden adalah perdana menteri dan tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri dan para menteri kabinet. Berarti saat ini Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem ini kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan apabila pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen maka kabinet harus mengundurkan diri atau dibubarkan.

Konstitusi RIS mengenal 6 lembaga negara yaitu presiden, dewan menteri, senat, DPR, MA, DPK (Dewan Pengawas Keuangan). Berlakunya sistem pemerintahan parlementer ini tidak berlaku lama, hanya kurang lebih delapan bulan kemudian RIS dibubarkan dan kembalilah Indonesia dengan bentuk negara kesatuan. Pada masa ini pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), Pemberontakan Andi Azis dan Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS).

3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Demokrasi Liberal (17 Agustus 1945-5 Juli 1959)

Setelah RIS dibubarkan Indonesia menggunakan konstitusi UUDS 1950. Bentuk negara RI adalah negara kesatuan. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah

sistem pemerintahan parlementer. Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah namun, tanggung jawab pemerintah ditangan pedana menteri bersama para menterinya. Presiden dan wakil presiden tidak boleh diganggu gugat. Penanggung jawab tindakan pemerintah adalah para menteri sebagai kepala negara, tugas presiden terbatas contohnya hanya mengesahkan dewan menteri yang diusulkan oleh formatur kabinet, memberi tanda-tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang dan melaksanakan tugas-tugas seremonial. Dalam UUDS 1950 yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan dan pemerintahan adalah menteri-menteri kepada DPR. Di UUDS 1950 juga hanya mengenal 5 lembaga negara yaitu presiden, menteri, DPR, MA dan DPK (Dewan Pengawas Keuangan).

Pada masa demokrasi liberal terjadi ketegangan sosial politik akibat beberapa kali bergantinya kabinet, gagalnya Konstituante menentukan dasar negara, serta terjadinya sejumlah pemberontakan seperti PRRI/Permesta. Akibatnya muncul desakan untuk memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945. Pada masa ini pemberontakan yang terjadi adalah Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh dan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).

4. **Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-12 Maret 1967)**



Gambar : 3.4.5 Presiden Ir. Soekarno
Sumber : gurupendidikan.co.id

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945. Berarti sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial. Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena kedudukan presiden lebih dominan. Penyimpangan yang terjadi contohnya para pemimpin MPR, DPR, BPK dan MA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden, Presiden membubarkan DPR Tahun 1960 dan adanya UU No. 19 tahun 1964 yang membuat presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Pada masa ini pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan G30S/PKI.

5. **Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Orde Baru (12 Maret 1967-21 Mei 1998)**

Pada masa orde baru sistem pemerintahan tetap berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yaitu sistem presidensial. Presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan

para menteri. Selama orde baru telah terbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan I sampai Pembangunan 7. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan ditangan presiden dan KKN. Setelah itu kekuasaan orde baru berakhir setelah munculnya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Akhirnya Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presidenya, B.J. Habibie sebagai presiden RI ketiga.

6. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Reformasi (21 Mei 1998-Sekarang)



Gambar : 3.4.6 Peristiwa 1998

Sumber : cnn.indonesia.com

Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden Indonesia memasuki masa reformasi. Dimana muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis dan Otonomi Daerah pada tahun 1999. Pada masa reformasi, dilakukan amandemen atau perubahan pada UUD NRI Tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuannya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan. Pada masa reformasi Indonesia mengalami lima kali pergantian presiden yaitu B.J. Habibie (memimpin tahun 1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati Soekarno Putri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Joko Widodo (Sejak Tahun 2004).

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kehadiran maklumat 14 November 1945 membuat presiden tidak lagi berfungsi sebagai kepala pemerintahan, melainkan hanya sebagai kepala negara. Jabatan oleh Perdana Menteri.
2. Sejak 27 Desember 1949, berdasarkan perjanjian konferensi Meja Bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat (Republik Indonesia Serikat). Berdasarkan Konstitusi RIS, presiden adalah kepala negara. Adapun tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri dan para menteri kabinet.
3. Berdasarkan UUDS 1950, presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan perdana menteri bersama para menterinya.
4. Melalui Dekret presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945. Hal ini berarti sejak itu sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan UUD NRI

tahun 1945. Presiden menjadi kepala pemerintahan dalam penyelenggaraan negara.

5. Pada masa reformasi dilakukan amandemen atau perubahan pada UUD NRI tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara terjadi sistem check and balances (perimbangan kekuasaan), yaitu pengaturan kewenangan dan kekuasaan masing masing lembaga negara sehingga saling mengimbangi dan membatasi satu sama lain berdasarkan ketentuan UUD.

D. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Pada tanggal 2 September 1945 disusunlah kabinet pertama RI yang mengangkat menteri sebanyak
 - A. 15
 - B. 16
 - C. 17
 - D. 18
 - E. 19
2. Lembaga ini bentuk pada tanggal 29 Agustus 1945. Salah satu ketetapan mengenai pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia. Nama lembaga negara tersebut adalah
 - A. BPUPKI
 - B. PPKI
 - C. KNPI
 - D. DPK
 - E. MA
3. Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) terjadi pada masa
 - A. Revolusi Kemerdekaan
 - B. RIS
 - C. Demokrasi Liberal
 - D. Orde Baru
 - E. Reformasi
4. Presiden yang mundur dari jabatannya karena gerakan reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 adalah
 - A. Soekarno
 - B. Soeharto
 - C. B.J. Habibie
 - D. Abdurrahman Wahid
 - E. Megawati Soekarno Putri
5. Gagalnya konstituante menentukan dasar negara, serta terjadinya sejumlah pemberontakan seperti PRRI/Permesta. Akibatnya muncul desakan untuk memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945, peristiwa tersebut terjadi pada masa
 - A. Revolusi Kemerdekaan
 - B. RIS
 - C. Demokrasi Liberal
 - D. Orde Baru
 - E. Reformasi

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 2

1. C 2. C 3. B 4. B 5. C

Pembahasan soal :

1. Pada tanggal 2 September 1945 disusunlah kabinet pertama RI yang mengangkat 17 menteri juga mengangkat sejumlah pejabat tinggi negara.
2. Pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah KNIP dan PPKI dibubarkan. Salah satu ketetapan mengenai dibentuknya KNIP adalah pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia.
3. Pada masa RIS ini pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), Pemberontakan Andi Azis dan Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS).
4. Soeharto melalui gerakan reformasi. Akhirnya Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presidenmya, B.J. Habibie sebagai presiden RI ketiga.
5. Pada masa demokrasi liberal terjadi ketegangan sosial politik akibat beberapa kali bergantinya kabinet, gagalnya Konstituante menentukan dasar negara, serta terjadinya sejumlah pemberontakan seperti PRRI/Permesta. Akibatnya muncul desakan untuk memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945.

E. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 2 ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat memahami persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, masa RIS, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa orde baru dan masa reformasi		
2.	Saya dapat memahami persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia pada masa masa RIS		
3.	Saya dapat memahami persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia pada masa masa demokrasi liberal		
4.	Saya dapat memahami persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia pada masa masa orde baru		
5.	Saya dapat memahami persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia pada masa masa reformasi		
6.	Saya dapat menghargai para pendiri bangsa dengan upaya menjaga dan mempertahankan NKRI		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

EVALUASI

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Pada masa Demokrasi Terpimpin, telah terjadi berbagai penyimpangan dari kerangka yang telah ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu penyimpangan itu adalah
 - A. MPR lembaga yang membawahi dan berkedudukan lebih tinggi dari presiden
 - B. Presiden tidak dapat membubarkan DPR
 - C. Presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan
 - D. Presiden harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada MPR
 - E. DPR sebagai lembaga tinggi negara kedudukannya sejajar dengan presiden
2. Dalam pemerintahan parlementer pada masa negara Republik Indonesia Serikat berlangsung selama
 - A. empat bulan
 - B. delapan bulan
 - C. sembilan bulan
 - D. sepuluh bulan
 - E. sebelas bulan
3. Pada masa reformasi, telah terjadi beberapa kali pergantian presiden. Presiden Joko Widodo yang memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan saat ini adalah presiden ke
 - A. 3
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 6
 - E. 7
4. Perhatikan hal-hal berikut:
 - 1) sejarah penderitaan
 - 2) tekad untuk hidup bersama
 - 3) perjuangan kemerdekaan
 - 4) perjuangan satu daerah
 - 5) kekuatan pejuang di JawaHal yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam sejarah yang dialami bersama ditunjukkan nomor
 - A. 1), 2) dan 3)
 - B. 1), 3) dan 4)
 - C. 2), 3) dan 4)
 - D. 2), 4) dan 5)
 - E. 3), 4) dan 5)
5. Dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 tercantum bahwa negara Indonesia berdasarkan atas
 - A. kekuasaan
 - B. hukum
 - C. konstitusi
 - D. absolutisme
 - E. trias politika

6. Penanggung jawab pemerintahan di Indonesia ketika dikeluarkan maklumat presiden tanggal 14 November 1945 berada pada
 - A. Presiden
 - B. MPR
 - C. Perdana menteri
 - D. DPR
 - E. Gubernur jenderal

7. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah
 - A. presiden
 - B. parlementer
 - C. liberal
 - D. komunis
 - E. demokrasi liberal

8. Berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar, sejak 27 Desember 1949, NKRI berubah menjadi negara
 - A. serikat
 - B. monarki
 - C. merdeka
 - D. berdaulat
 - E. bagian Belanda

9. Setelah Masa Orde Baru berakhir dan beralih ke Masa Reformasi, rakyat Indonesia memiliki kebebasan untuk melaksanakan kedaulatannya secara langsung yaitu
 - A. memiliki kebebasan berpendapat
 - B. memiliki hak untuk menjadi kepala daerah
 - C. bebas untuk melakukan kegiatan keagamaan
 - D. memilih presiden dan wakilnya dalam pemilu
 - E. bebas membentuk partai politik

10. Daerah Nusa Tenggara Barat memiliki komoditas alam yang sangat kaya untuk dapat dikembangkan, yaitu mutiara air laut. Budidaya alam mutiara saat ini berkembang pesat menjadi salah satu komoditi andalan bagi daerah tersebut, bahkan juga ekspor. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari salah satu kebijakan politik dalam masa reformasi, yaitu
 - A. kebebasan berusaha
 - B. kearifan lokal
 - C. otonomi daerah
 - D. usaha kecil menengah
 - E. kemajuan dalam usaha koperasi

11. Pak Dona seorang pejabat sebuah instansi pemerintahan dan merupakan anggota aparatur negara senior. Ia memiliki prinsip bahwa anak atau saudaranya harus bisa menjadi anggota aparatur negara juga melalui bantuannya karena ia merasa memiliki wewenang untuk mengangkatnya. Pemikiran Pak Dona tersebut sangat merugikan bagi para sarjana atau calon pegawai pemerintahan yang ingin mendapatkan kesempatan tersebut. Hal tersebut merupakan tindakan yang dapat dianggap penyelewengan jabatan, yaitu
 - A. korupsi
 - B. kolusi
 - C. nepotisme
 - D. sentralisasi

- E. demokrasi
12. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sekarang adalah
- A. parlementer
 - B. presidensial
 - C. konstitusional
 - D. kesatuan
 - E. republik
13. Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan. Hal ini terdapat dalam
- A. Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945
 - B. Pasal 2 UUD NRI Tahun 1945
 - C. Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945
 - D. Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945
 - E. Pasal 5 UUD NRI Tahun 1945
14. Kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara
- A. demokrasi
 - B. berkedaulatan
 - C. merdeka
 - D. kesatuan
 - E. hukum
15. Salah satu keuntungan negara kesatuan adalah
- A. semua diatur dari pusat
 - B. daerah menjadi perpanjangan tangan pemerintahan pusat
 - C. keputusan penting dibuat oleh pemerintahan
 - D. organisasi negara lebih terjamin keteraturannya
 - E. seluruh wilayah negara mempunyai peraturan yang seragam
16. Negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Pendapat tersebut dikemukakan oleh
- A. Max Weber
 - B. Mac Iver
 - C. Prof. Mr. Soenarko
 - D. Prof. Miriam Budiardjo
 - E. Harold J. Laski
17. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat dan Jawa Tengah terjadi pada masa
- A. Revolusi Kemerdekaan
 - B. RIS
 - C. Demokrasi Liberal
 - D. Orde Baru
 - E. Reformasi
18. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945. Berarti sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan
- A. parlementer
 - B. presidensial
 - C. konstitusional

- D. kesatuan
 - E. republik
19. Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7, merupakan nama kabinet pada masa ...
- A. Revolusi Kemerdekaan
 - B. RIS
 - C. Demokrasi Liberal
 - D. Orde Baru
 - E. Reformasi
20. Jumlah lembaga negara yang dibentuk pada masa
- A. Revolusi Kemerdekaan
 - B. RIS
 - C. Demokrasi Liberal
 - D. Orde Baru
 - E. Reformasi

B. URAIAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pasca reformasi!
2. Sebutkan penyimpangan-penyimpangan pada masa orde baru
3. Jelaskan tentang kabinet pertama negara Indonesia!
4. Jelaskan tentang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945!
5. Setelah dikeluarkam Maklumat 14 November 1945 terlihatlah sistem pemerintahan Indonesia yang beralih dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Dengan peralihan tersebut membuat terbentuknya banyak kabinet, sebutkan nama-nama kabinet tersebut!

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Pilihan Ganda

- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 1. C | 6. C | 11. C | 16. A |
| 2. B | 7. B | 12. B | 17. A |
| 3. E | 8. A | 13. A | 18. B |
| 4. A | 9. A | 14. D | 19. D |
| 5. B | 10. C | 15. B | 20. C |

Uraian

1. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden Indonesia memasuki masa reformasi. Dimana muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis dan Otonomi Daerah pada tahun 1999.
2. Pada masa orde baru terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan ditangan presiden dan KKN.
3. Pada tanggal 2 September 1945 disusunlah kabinet pertama RI yang mengangkat 17 menteri juga mengangkat sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah itu keluarlah maklumat pemerintahan yaitu Maklumat 5 Oktober 1945, Maklumat 3 November 1945 dan Maklumat 14 November 1945. Setelah dikeluarkam Maklumat 14 November 1945 kedudukan presiden berubah, hanya berfungsi sebagai kepala negara saja.
4. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945. Dilaksanakanlah sidang PPKI. Sidang tersebut menetapkan UUD NRI Tahun 1945 dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah itu PPKI menetapkan pembagian kekuasaan dengan mem bagi Indonesia menjadi 8 provinsi.
5. Setelah dikeluarkam Maklumat 14 November 1945 kedudukan presiden berubah, hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Karena fungsi kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Terlihatlah sistem pemerintahan Indonesia yang beralih dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Dengan peralihan ke sistem pemerintahan parlementer, membuat terbentuknya banyak kabinet seperti kabinet presidensial, kabinet Sjahrir I, kabinet Sjahrir II, kabinet Sjarir III, kabinet Amir Sjarifuddin I, kabinet Amir Sjarifuddin II, Hatta I dan Hatta II.

DAFTAR PUSTAKA

Kardiman, Yuyus, dkk. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Tri Purwanto, Bambang & Sunardi H.S. 2017. Membangun Wawasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Solo. Penerbit PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

<http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/09/pengertian-negara-unsur-fungsi-tujuan.html>

<https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/mengenal-konsep-negara-kesatuan-atau-unitarisme-4594/>